



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/ 3053 /IX/2019
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Bogor, 11 September 2019

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran
di
Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Damai Dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Unhan TA. 2018/2019.
2. Sehubungan dasar diatas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Unhan atas nama Aniza Kemala NIM: 120180303005, Nomor HP: 08786963376, email: anniza.kemala@idu.ac.id, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Penanganan Terhadap Jugun-Lanfu sebagai Korban Konflik Kekerasan Militer Jepang oleh Organisasi Kemanusiaan Jepang di Indonesia".
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian untuk menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.

an Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Sudibyo, S.E., D.S.S., M.Si
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Kemensos RI
2. Sekjen Kemhan RI
3. Rektor Unhan
4. Dekan FKN Unhan
5. Karo AK Unhan
6. Kakesbangpol DKI Jakarta.

DAFTAR PEJABAT

1. Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia
2. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial Republik Indonesia
3. Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia
4. Deputi bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Kondisi Khusus- Subbidang Perlindungan Hak Perempuan Lansia dan Penyandang Masalah Sosial Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
4. Direktur *Independent Legal Aid Institute* (ILAI) Yogyakarta)
5. Direktur Eksekutif *Global Future Institute*
6. Kepala Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan (Plt) Komnas HAM)
7. Ketua Komnas Perempuan Indonesia
9. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta
10. Aktivis dan *independent researcher* untuk *Jugun-lanfu*)

an Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,



Sudibyo, S.E., D.S.S., M.Si
Mayor Jenderal TNI

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Lembaga Pemerintahan dan Organisasi Kemanusiaan

1. Berapa jumlah *lanfu* keseluruhan di Indonesia yang terdata?
2. Berapa jumlah *lanfu* yang terdata masih hidup pada saat AWF didirikan dan berapa jumlah yang telah wafat?
3. Apakah lembaga melakukan kontak secara langsung dengan para pada saat AWF ada dan setelah AWF dibubarkan?
4. Bagaimana kondisi kehidupan ekonomi, psikologis, dan sosial para korban ketika kontak dilakukan?
5. Jika korban telah meninggal dunia, apakah kompensasi bagi keluarga korban dibutuhkan?
6. Apakah tetap ada usaha penanganan dalam permasalahan ini pasca AWF dibubarkan?
7. Bagaimana dari pihak Jepang? Menurut anda apa yang menyebabkan Jepang terus menyangkal pertanggungjawaban mereka atas permasalahan ini?
8. Apakah hubungan bilateral Jepang dan Indonesia turut mempengaruhi niatan kedua negara dalam penanganan hal ini?
9. Apakah terdapat kerjasama langsung dengan Jepang/Indonesia dalam penanganan hal tersebut pasca dibubarkannya AWF?
10. Apakah terdapat usaha untuk menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama terus menangani permasalahan ini?

Kepada aktivis/aktor masyarakat yang pernah berinteraksi dengan korban

1. Apakah para korban dapat terintegrasi secara baik di masyarakat?
2. Bagaimana kondisi kehidupan ekonomi para korban?
3. Bagaimana korban menanggapi pembicaraan yang berkaitan dengan Jepang dan pertanggungjawabannya?
4. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat mengenai permasalahan ini? Apakah masyarakat sekitar/masyarakat secara umum memiliki kesadaran yang tinggi mengenai apa yang terjadi dalam sejarah serta isu ini? Bagaimana mereka memandang keberadaan mantan *lanfu*?
5. Apakah terdapat usaha untuk membantu para korban pada masa AWF, tidak hanya dalam bentuk bantuan ekonomi, namun juga bantuan psikologis dan fisik?

6. Bagi para korban, manakah yang paling penting, ganti rugi dan kompensasi ekonomi atau tanggung jawab moral (permintaan maaf langsung dari pemerintah Jepang serta penguakan kebenaran)?
7. Jika korban telah meninggal dunia, apakah kompensasi bagi keluarga korban dibutuhkan?
8. Bagaimana dari pihak Jepang? Menurut anda apa yang menyebabkan Jepang terus menyangkal pertanggungjawaban mereka atas permasalahan ini?
9. Mengapa respon pemerintah Indonesia terhadap permasalahan ini sangat berbeda dengan respon pemerintah negara lain dimana terdapat korban, seperti Korea Selatan dan Cina?
10. Apakah setelah lamanya waktu berlalu, mungkinkah bagi para korban untuk memaafkan apa yang dilakukan para tentara Jepang jika pihak Jepang benar-benar meminta maaf?
11. Apakah pertemuan langsung yang dimaksudkan untuk rekonsiliasi di antara para pelaku kekerasan dan para korban memungkinkan untuk dilakukan?

LAMPIRAN 3

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Wawancara dengan Eka Hindrati

Identitas Informan

Nama : Eka Hindrati
 Jabatan : Peneliti Independen '*ianfu*'
 Email : ekahindra@yahoo.com

- a. Salah satu hal yang menjadi permasalahan adalah mengenai status kompensasi yang diterima dari AWF. Apakah masih terdapat korban mantan '*ianfu*' yang menuntut kompensasi tersebut hingga saat ini?

Masih ada, misalnya seorang mantan '*ianfu*' yang berasal dari Sulawesi. Sekarang sudah meninggal. Beberapa kali, masih menganggap uang AWF ada, padahal aku udah bilang tidak. Dia selalu bilang uang itu masih ada di pemerintah beberapa milyar, itu nggak ada. Makanya pemerintah bilang udah selesai karena uangnya sudah habis. Aku bilang jangan pakai perjuangan seperti itu karena nanti hanya akan kecewa, akhirnya meninggal tahun lalu dan nggak ada hasilnya. Jadi dia masih menganggap ada uang dan keliling ke kemendagri, ke Komnas HAM berkali-kali, walaupun pengaduan ke Komnas HAM, Komnas HAM tidak memiliki kekuatan sebagai Lembaga negara, namun lebih menampung dan memberi saran. Terakhir sebelum beliau meninggal bertemu dengan Yohana Yembise, padahal juga tidak ada hasil. Mencari duit juga sudah tidak ada. MoU-nya sendiri mulai tahun 1997 sampai 2007. Transparansi yang pernah dibuka di media itu angsuran pertama, dan setelah itu, gelap, tidak ada transparansi dan partisipasi publik, dalam hal ini survivor dan keluarganya, para aktivis yang mendukung. Di buku terbitan komnas HAM juga ditulis tentang hal tersebut.

- b. Berarti hanya ada bagian pertama yang terdapat transparansi, apakah itu merupakan pembangunan panti jompo oleh Kemsos?

Iya. Itu perlu dicek lagi ya di artikel. Tahun 1997, di suatu koran diberitakan tentang hal tersebut. Setelah itu kita nggak pernah tahu setiap tahun berapa saja yang turun, selama 10 tahun itu berapa saja dari 380 juta yen itu, sampai habis 10 tahun berapa setiap tahunnya. Tapi sebenarnya itu bisa diminta sama Kementerian Sosial, laporan skema itu ada. Mereka udah bikin laporan selama 10 tahun itu. Tapi yang dipublikasi hanya tahun pertama. Saya tahun 2008 atau 2009, 2008 lah ya, saya pernah mengunjungi sebagai penelitian, penasaran apakah pantinya memang ada dan kondisinya bagaimana. Saya mengambil sampling panti jompo family di Blitar, dikelola

oleh sipil bernama Pak Jono dan Pare yang di Kediri, di bawah Kemensos. Duaduanya menerima dana AWF, rupanya cara pengelolaannya diberi dua sekian, dan kasih monument batu bahwa panti ini menerima dana dari AWF. Dibuatnya tidak di seluruh panti, misalnya yang di Pare Kediri dibangun beberapa kamar, nggak seluruh, projek-nya kayak gitu. Sementara yang swasta sifatnya kerjasama, panti ini hanya men-support, fasilitas, misalnya tempat tidur. Tapi lahannya udah ada, udah sama bangunan, gitu loh. Satu lagi saya nggak sempet visiting 2009, ketemu dengan kepala dinas sosialnya Ambon. Di antara semua itu tidak pernah ada '*ianfu*' yang pernah tinggal disana. Kalaupun ada, saya ketemu yang di Kediri, itu nggak sengaja, bukan karena dia '*ianfu*', Cuma memang lansia terlantar. Belakangan saya investigasi dan ternyata dia '*ianfu*', tapi masuk ke pantinya bukan. Jadi ini skenario, kendaraan politik pemerintah Jepang untuk cuci tangan, membungkam hak-hak '*ianfu*' untuk bersuara dan menggugat pemerintah Jepang. Jadi uangnya tidak ada sama sekali satu sen-pun, selama hampir 20 tahun, tidak ada satu pun '*ianfu*' yang menerima satu sen, tidak ada yang betul ada di satu panti jompo. Kesimpulannya memang ini hanya sebuah project, AWF, Asia Women's Fund untuk '*ianfu*' di Indonesia, mau ada '*ianfu*'-nya atau nggak, yang penting ada laporan pemerintah Jepang. Jadi itu clear, bahwa ini uang cuci tangan politik pemerintah Jepang ke Pemerintah Indonesia supaya pemerintah Indonesia tidak menuntut dan tidak mempersoalkan secara politik.

- c. Kemarin kebetulan sudah ke Kementerian Sosial dan diberikan laporannya. Memang isinya hanya pembangunan panti jompo. Dan hal itu yang benar-benar membedakan Indonesia dengan Korea Selatan dan negara-negara lain, betul begitu?

Ya, itu jelas. Justru sebenarnya Korea Selatan menolak untuk menerima. Pemerintah justru menampar kembali secara politik, menolak uangnya, dan mereka sendiri yang memberikan uang pada para halmeoni-halmeoni dengan jumlah yang lebih besar. *Halmeoni-halmeoni* itu mendapat uang setiap bulan dan mereka diberi fasilitas untuk shelter, namanya house of sharing, saya udah kesana, di Gwangju. Jadi punya kebebasan apakah mau tinggal di *house of sharing* atau *nanum house* namanya, atau tinggal di rumah keluarganya. Tapi kebanyakan dari mereka yang nggak menikah dan tidak berkeluarga tinggal di *house of sharing*, dan tiap bulan mendapat tunjangan yang sangat baik dari pemerintah, karena Korea memaknai mereka sebagai veteran perang. Itu sangat berbeda. Sementara kalau di Filipina, hak untuk dibuka transparansi publik, dibuka ruang dialog, pemerintah, kepada Survivor, kemudian survivornya punya hak mau menerima atau tidak, itu diserahkan kepada survivor. Saya udah ke Filipina juga 2008 dan ketemu dengan 3 organisasi yang mendukung supporter isu '*ianfu*', lola kampanyera, lila filipin, dan lola Malaya. Mereka walaupun gerakannya terpecah,

pemerintah membuka ruang itu, dan itu diserahkan kepada publik, kepada rakyatnya, itu berbeda kan.

- d. Bagaimana dengan Jaringan Advokasi Jugun-ianfu (JAJI)? Apakah sekarang ini masih aktif?

Jadi saya ini termasuk pendiri dan perumus JAJI karena pada waktu itu kalau tidak salah dibentuk tahun 2006. JAJI isinya NGO-NGO dan saya independent, tidak ada lembaganya. Di antara semua yang terlibat, saya yang punya pengalaman konkrit mengikuti tribunal dan memahami isu '*ianfu*', karena saya sudah terlibat sejak tahun 1999. Sehingga memang bisa dikatakan saya cukup punya peranan yang besar disana, misalnya menulis press release ke media, menjawab pertanyaan wartawan dan public melalui e-mail JAJI, karena kebanyakan LSM dan mereka juga punya isu banyak. Jadi seperti itu. Saya keluar tahun 2008 kalau tidak salah. Saya lebih fokus sebagai peneliti independen, tidak dalam konteks advokasi seperti NGO, karena saya punya keterbatasan dan saya ingin lebih fokus menulis. Jadi basis perjuangannya melalui tulisan, melalui data, melalui riset. Memang sejak saya tinggalkan saya tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan mereka dan sampai saat ini tidak kedengaran.

- e. Saya juga membaca bahwa terdapat apa yang disebut sebagai Jaringan Solidaritas '*ianfu*' Indonesia (JSII). Apakah ini berbeda dengan JAJI?

Ya, saya juga yang membentuk bersama dengan Dr. Koichi Kimura, ini semacam jaringan, jadi bukan NGO, sama seperti JAJI, jaringan. Jadi ini menunjukkan adanya kolaborasi Indonesia-Jepang, Jakarta-Fukuoka sebagai solidaritas untuk menandai bahwa Dr. Koichi Kimura sebagai orang yang mengungkap kasus '*ianfu*' pertama kali tahun 1992, beliau mentor saya, guru saya, karena penelitian ini beliau yang mulai, menandai bentuk kolaborasi ini. Tapi ini bukan suatu kepemilikan. Siapa saja teman-teman yang concern, independent, atau siapa, itu masuk ke jaringan solidaritas karena memang bersolidaritas terhadap isu '*ianfu*'. Dan sampai hari ini masih ada karena itu bentuknya bukan organisasi, tetapi jaringan kerja, dan sepanjang kerja-kerja itu ada untuk '*ianfu*', JSII ada.

- f. Bagaimana awalnya Mba Eka mulai meneliti tentang '*ianfu*' bersama dengan Dr. Koichi Kimura?

Kalau sudah baca buku Momoye sebenarnya sudah ada di situ. Tahun 1999 sebagai jurnalis, saya mendapat tugas untuk meliput biografi untuk program Radio Women's Program untuk kantor berita internews, itu '*ianfu*'. Saya bertemu dengan beliau sebagai narasumber, saya bertemu dengan beliau di Jakarta, karena beliau bermukim di

Salatiga. Setelah saya bertemu beliau, itu inspiratif dan sebenarnya sangat memukul perasaan saya, kok malah orang Jepang yang mengangkat kasus ini karena kesalahan nenek moyang mereka yang berperang disini. Itu juga sebetulnya memberikan kejutan luar biasa secara personal sampai akhirnya saya mulai menawarkan diri kalau ada sesuatu yang bisa dibantu. Sampai akhirnya setiap kali Pak Koichi ini ke Jakarta, saya pasti ketemu beliau di Jakarta untuk diskusi dan lama-lama diskusi ini menghasilkan ide dan akhirnya kita nulis buku bareng, Mardiyem, Kita kemudian berbagi peran dan buku itu jadi setelah 4 tahun. Kemudian sampai hari ini kita masih kolaborasi, yang terakhir kita terlibat proyek UNESCO Project World Heritage untuk PBB 2016-2017 kita kerja dengan 8 negara lain, koordinatornya Korea, masing-masing negara kita mengumpulkan hasil riset masing-masing untuk kemudian didaftarkan di UNESCO sebagai World Heritage. Namun ada intervensi pemerintah Jepang untuk meng-cut ini, sehingga UNESCO di Paris *suspend*, menunda. Jadi keputusan menolak ngga, menerima ngga, *suspend*, Dan ini masih jalan, termasuk juga Pak Koichi, meskipun beliau bermukim di Jepang, beliau masuk ke tim Indonesia bersama saya, karena risetnya di Indonesia. Selain beliau ada nama-nama lain, ada dua orang lagi, orang Jepang yang tinggal di Osaka; Takahashi Suzuki. Beliau juga melakukan riset di Sulawesi Selatan. Lalu Profesor Mizuno dari Osaka University yang tinggal di Tokyo. Kami berkolaborasi, cuma memang tandem saya Dr. Koichi Kimura. Tapi kita saling mendukung karena kita tidak bisa meng-cover semuanya sendiri, karena Indonesia luas, *survivor*-nya banyak. Jadi mereka juga Tim Indonesia. Tapi karena mereka bukan orang Indonesia, saya yang betul-betul wakil.

- g. Untuk proyek UNESCO, 8 negara tersebut apa saja selain Indonesia?
Indonesia, lalu Timor Leste, Filipina, Korea Selatan, Cina, terus kemudian Belanda, Taiwan. Sebenarnya Korea ada dua, Korea Selatan dan Korea Utara. Saya pernah ketemu dari Korea Utara tahun 2000-an, dan foto-foto '*ianfu*' dari Korea Utara lebih brutal karena di foto-foto itu mereka ditato oleh pemerintah Jepang. Seperti Sapi, di-stempel, misalnya di perut, di bagian bawah bibir, untuk menunjukkan kalau mereka melarikan diri. Dengan tanda militer seperti itu, tidak ada yang mau membantu perempuan-perempuan yang melarikan diri, karena mereka takut dibunuh kan. Jadi Korea sebenarnya dibagi dua, Selatan dan Utara. Walaupun perjuangan Korea Utara, 5-6 tahun terakhir ini saya tidak bertemu mereka di forum-forum internasional. Padahal mereka punya NGO sendiri untuk isu ini.
- h. Tahun berapa Ibu Mardiyem meninggal? Bagaimana kondisi Ibu Mardiyem ketika meninggal dunia? Bagaimana dengan ahli waris-nya?

Ibu Mardiyem meninggal tahun 2007, 4 bulan setelah Buku Momoye terbit. Meninggal karena sakit. Ahli warisnya juga sudah meninggal. Anak satu-satunya meninggal, dan anaknya bercerai dari istrinya karena secara kekeluargaan sudah putus ya. Saya tidak pernah mengenal 2 anaknya walaupun mereka tinggal di Bojong, dan mereka tidak pernah kenal saya, jadi saya tidak tahu reaksi mereka seperti apa. Tapi bisa dipastikan kalau mereka tidak terlalu memahami isu ini. Tidak seperti korban-korban penyintas lainnya yang keluarganya saya kenal, saya bisa tahu mereka reaksinya seperti apa, kadar dukungannya seperti apa bisa dilihat. Kalau ini terputus.

- i. Bagaimana dengan para penyintas atau korban-korban lain? Apakah ada dari mereka yang masih hidup dan melakukan contact dengan Mba Eka?

Ada, beberapa yang di Pulau Jawa. Tapi memang mereka sudah makin—yang terakhir meninggal Nek Ucum, tahun lalu tapi saya masih punya hubungan baik dengan anaknya. Masih suka main ke rumahnya di Sukabumi. Masih ada di Sukabumi, kemudian di Jawa Tengah, tapi memang agak sulit ter-update karena orang-orang yang punya kontak di sekitar penyintas rata-rata tinggal di daerah, di desa, cenderung ada kendala di komunikasi. Persoalan lain yang jadi fundamental, di Indonesia tidak ada satupun NGO atau Lembaga non-profit yang khusus mengurus hal ini. Sehingga tidak satu pintu, pecah-pecah, terurai dimana-mana. Makanya ada beberapa Lembaga yang mengurus, tidak terfokus. Misalnya di Taiwan ada RWF, kemudian di Korea, *Korean Council*, suporternya berlapis, banyak, dengan *Korean Council* sebagai sentral advokasi, karena mereka bekerja langsung di bawah perdana Menteri

- j. Untuk para korban yang masih hidup, apakah mereka masih menuntut hak mereka? Atau karena mereka sudah terlalu tua, mereka sudah mulai menyerah untuk mendapatkan kompensasi ataupun permintaan maaf dari Jepang?

Sepanjang yang saya tahu, jelas mereka menuntut itu, tapi apa daya, mereka merasa jadi korban dan berhak mendapat kompensasi perang, tapi kan nggak pernah jelas sehingga ya pasti seperti kita tahu, harapan mereka menjadi harapan yang kabur. Beberapa dari mereka ya pasrah, menuntut tapi gimana, karena upaya yang mereka lakukan tidak terlepas dari pemerintah dan masyarakat sipil. Sementara dukungan itu minim, untuk bisa mendapat perhatian pemerintah.

Walaupun di tahun 2017, saya pernah mendapat panggilan dari istana oleh Kantor Staf Presiden, oleh Mba Jaleswari Pramodhawardani, Deputi III, untuk isu '*ianfu*', sebelum Kepala Staff diganti Bapak Moeldoko. Sebenarnya sudah ada upaya, sudah ada satu tanda yang baik secara politik, sebelum terjadi pergantian Kepala Staff. Jadi, seperti Sri Sukanti, beliau mendapat perlakuan layak dari negara.

Beliau di-fasilitasi Kelas 1 di Rumah Sakit Daerah, langsung fasilitas dari Walikota, akrena di telepon oleh Mba Dani. Kenapa Mba Dani jadi tahu isu '*ianfu*'? Karena teman kita yang aktivis, Dewi Chandraningrum, memproduksi, sebagai campaign, selendang sutra dalam bentuk lukisan potret '*ianfu*'. Jadi, dibelilah oleh Mba Dani yang memang berkawan. Kemudian Mba Dani bertanya soal itu, diberi tahu itu adalah '*ianfu*', Sri Sukanti. Ketika itu Mba Dani berkata, "Kok saya tidak tahu ya?". Kebetulan waktu itu Hari Tani Nasional dan Jokowi datang. Karena dekat, dan Hari Tani itu di Salatiga, ditelefonlah Walikota. Akhirnya mendapatkan perhatian. Setelah itu Dewi Candraningrum merekomendasikan, karena saya di Jakarta, Mba Dani mem-follow up untuk ketemu saya. Begitulah kenapa November 2017 saya diundang ke istana presiden.

Lalu ada dialog di Deputi III saya diminta untuk pemaparan situasi lokal, nasional, dan internasional. Sebetulnya waktu itu sudah ada rencana. Yang pertama saya bilang, tujuan pemerintah apa dulu. Karena sebetulnya dari sana tujuan pemerintah adalah untuk memutakhirkan jumlah penyintas, itu sebetulnya harus dilakukan, itu tugas negara. Data-data yang saat ini ada tidak dikumpulkan oleh negara, namun pihak lain atas inisiatif masyarakat sipil. Karena itulah jumlah data memiliki tiga versi. Lalu mana yang dipegang? Inilah mengapa persoalannya disindir juga, karena tidak ada intervensi pemerintah untuk melakukan itu sehingga satu pintu semuanya.

Waktu itu pemerintah sudah ada komitmen positif, yang saya bilang kalau saya mau membantu pemerintah dengan catatan, nomor 1 harus memperhatikan kesejahteraan korban. Harus sepakat dulu kita, baru setelah itu mengkonsolidasi membuat pertemuan-pertemuan para aktivis dan supporter, kami-kami yang bekerja untuk isu ini, agar bisa memperkuat, membagi tugas, apa saja yang bisa kita lakukan bersama. Jadi itu yang baru menikmati Sri Sukanti, mendapat fasilitas kesehatan terbaik dalam hidupnya, juga renovasi rumah sebelum meninggal, seharga 30 juta. Itu seharusnya dinikmati juga oleh penyintas yang lain, tidak hanya satu orang. Tapi ya, tahun 2018, kepala staff diganti dan terhenti begitu saja.

- k. Bagaimana dengan Forum Ex-*Heiho* Indonesia? Apa Mba Eka memiliki informasi mengenai mereka?

Ya, tahu, bahkan Pak Darmawi yang menjadi motor Gerakan di Sulawesi Selatan belakangan menjadi ketua Ex-*Heiho*. Sebetulnya saya kenal dengan Ex-*Heiho* sejak awal sejak mereka masih dikelola langsung oleh *Heiho*-nya. Kalau sekarang kan keturunannya. Organisasi ini dibentuk tahun 1989, karena mereka veteran tentara Jepang. Mereka membentuk ex-*heiho* karena mereka merasa pemerintah Jepang belum membayar 2/3 gaji mereka dan mereka merasa bahwa masa dinas mereka

belum diakhiri. Efek historinya kurang baik, seakan-akan mereka pengkhianat. Padahal tidak seperti itu konteksnya. Jadi dari sisi historis, mereka agaknya tersingkirkan.

Tapi kemudian belakangan, mereka mentok tidak ada jalan untuk meng-klaim itu karena tidak gampang. Akhirnya mereka melihat peluang dari *'ianfu'*, yang masih bisa meng-klaim sebagai korban perang Asia Pasifik. Akhirnya ketika membentuk forum komunikasi di berbagai provinsi, mereka sistematis, termasuk ketika mendata korban-korban *'ianfu'*. Pengumpulan data itu fantastis, sampai 22.000 sekian, kemudian dikurangi Timor Leste yang sudah merdeka jadi 19.000 sekian. Sayangnya, dalam pengumpulan nama itu ternyata banyak nama-nama yang bukan *'ianfu'*. Misalnya Namanya dimasukan agar dapat kompensasi. Ketika diverifikasi, ternyata pada zaman Jepang nama tersebut masih berumur 3 tahun, atau dia tidak tahu apa-apa dan namanya dicantumkan. Mengapa saya bilang seperti ini? Karena saya sudah melakukan riset, sampling, saya mendatangi 2 lokasi di Wonokromo, Surabaya dan di Blitar dari data ex-heiho. Tidak ada *'ianfu'* disana. Mereka hanya ikut-ikutan dan ketika zaman *'ianfu'* masih kecil. Jadi nama mereka dicatut untuk mendapatkan uang karena tahun 1993, kalau bisa dapat potongan koran, Harian Merdeka, ada "Korban *'ianfu'* Dicari" karena kedatangan Neichibenren, Asosiasi Pengacara Jepang karena akan diadakan Konferensi Asia Pasifik di Jepang waktu itu.

Jadi melihatnya uang, kesadaran untuk membuka isu ini bukan karena *human rights*, tapi karena uang, sehingga dari situ saja perjuangannya sudah berbeda. Akhirnya karena saya melakukan verifikasi, dsb saya jadi tahu. Mereka basis perjuangannya uang. Sehingga untuk membiayai gerakan-gerakannya mereka minta uang dulu ke penyintas. Saya mendatangi seorang mantan *Heiho* bernama Pak Andi di Garut dan beliau bercerita kalau perjuangan internal heiho pun harus setor uang, misalnya untuk mereka ke Jepang, dengan menarik uang. Mereka sampai menjual harta benda untuk memberi forum komunikasi.

Bagi saya ini meresahkan. Ketika saya menghadiri sebuah forum Internasional di Tokyo dengan Pak Koichi Kimura saya bertemu dengan Kenichi Takagi, langsung ke kantornya di Tokyo dan bertanya tentang posisi kasus Heiho di pengadilan Jepang, apakah memang ada peluang, karena meminta-minta uang ini juga sudah masuk criminal. Ini permasalahan serius karena ex-heiho ini ada di seluruh Indonesia. Dari hasil diskusi, Pak Kenichi yang memang sudah mengawal para ex-heiho dari awal, bahwa sudah ada keputusan Mahkamah Agung Jepang tahun 2003 bahwa kasus Heiho ini sudah selesai, karena menggunakan hukum positif Jepang.

Sementara untuk kasus *'ianfu'* masih ada celah karena kami menggunakan Hukum Internasional sebagai instrument-nya. Oleh karena itu, hal ini dilirik oleh Heiho. Pak

Kenichi sendiri sudah menginformasikan mengenai hal tersebut ke forum komunikasi ex-heiho pusat. Namun kecurigaan, asumsi kami bahwa ketua forum tidak menginformasikan mengenai hal ini ke beberapa orang, karena jika disebarluaskan, mereka tidak bisa meminta uang lagi. Jadi soal itu clear ya.

- l. Lalu untuk Gerakan yang di Sulawesi Selatan sendiri apa masih ada?

Masih ada, untuk yang di Sulawesi Selatan bisa tanya-tanya sama Pak Mizuno. Kemarin juga sebenarnya ada project sama Pak Mizuno, meminta saya untuk menindaklanjuti Gerakan ini. Namun dengan kondisi yang sekarang tidak menguntungkan, transisi politik juga, lalu sejak pergantian Kepala KSP, semua isu Human Rights, tidak hanya '*ianfu*', banyak dicabut kebijakannya, tidak menyentuh hak azasi manusia. Tapi setidaknya itulah. Saya juga ingin mencoba lagi. Harus coba. Pemerintahan Jokowi sendiri memiliki hutang dalam penanganan permasalahan isu Hak Azasi Manusia.

- m. Bagaimana dengan hari '*ianfu*' sedunia?

Saya yang membawa Hari '*ianfu*' Internasional itu ke Indonesia. Jatuhnya setiap tanggal 14 Agustus. Kemudian itu dirayakan mulai tahun 2013 karena waktu itu ada *Asian Solidarity* tahun 2013, di Taiwan, itu keputusan bersama 8 negara.

Berhubung saya disini independent dan kita cair, maka tidak setiap tahun dirayakan. Kalau kita punya energi kayak tahun 2017, kita merayakan hari '*ianfu*' internasional dengan performance Tari Dwi Surni di Solo, tarian '*ianfu*' juga pameran lukisan Dewi Chandraningrum. Rencananya tahun depan saya dan teman-teman ingin merayakan lagi. Karena keterbatasan energi tidak bisa dirayakan setiap tahun. Perayaan ini juga untuk mengajak teman-teman generasi muda untuk berkumpul dan mendiskusikan hal ini.

2. Wawancara dengan Hilde Janssen

Identitas Informan

Nama : Hilde Janssen
 Jabatan : Jurnalis dan Antropologis
 Email : info@hildejanssen.nl

Q1: First of all, I would like to know if you have been in touch with any of the former comfort women after you finished the project? How is their current condition?

A1: Yes, I did. Last year, with the one who lives in central Indonesia--central java. They are getting old, that's for sure. Economically, they are not doing very well either. They have problems and they are struggling. they are not actively looking for compensation anymore and they can only hope. they have tried and struggled to get it in the past, but the movement gradually died down and now they can only hope.

Q2: I see. As I have seen in the documentary, they're indeed very traumatized by the event, thus affecting their psychological condition. Their economic condition isn't that great either. Did the AWF actually ever take that situation into consideration?

A2: They didnt get a chance to do individual compensation in Indonesia. AWF intended to do it, but the government couldn't accept it as they thought individual compensation would bring more shame to the women. There has been some recording when the government did an explanation about this point of view. I have to check whether I can find the references to it but I have seen it I think, there's some video recording on TV, one of the ministers or the officials from ministry of social welfare. Basically, they're ashamed of the women and then the government ordered the AWF to pay the money to social welfare ministry. If you go online you can find a report from AWF, but it's only some photographs that are not verifiable. AWF's existence didn't really give anything and only lasted until 2007.

NGOs were also involved in the process. There are also some activists had been trying to get compensation for the women. But hardly anybody got direct compensation and only got it through informal channels, some of them from Japan/people who supported them. None of the money from AWF reached them and that's why they're angry about it. Due to this difficulty, all the activists who tried to help them because they couldn't do it in their own, just like Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, gradually stopped the movement and network because they couldn't do a lot. There's ex-heiho Indonesia who also has been trying to get compensation through the former comfort women as well. I had a contact with ex-heiho Indonesia back in 2010 during a seminar that they held. They were still putting money and effort to get compensation for themselves as well but now they couldn't afford

to do it anymore. They said they were also facing some problems like getting cheated by a chair-person. So, the network was falling apart. All in all, the money from AWF has been spent by the Indonesian government. Japan also said that they had nothing to give anymore. That's what caused the victim to be gradually giving up as well. I think there are a lot of people trying to get parts or hands in this issue in order to benefit themselves from the money of AWF and gave negative impact on the women. They got cheated twice, by the government and these middle-men. They're mostly middle-men who cheated on them and said that they could help the former comfort women. Only to take away their money in the end without giving any result.

Because of this, the former comfort women and their families have very little trust on outsiders and that's why when I first came to them their family said that I'd only be after their money.

Q3: So that's why it's really hard to get them to trust us, right? Because of those problems.

A3: Yeah. Because in their villages, their neighbours tell them when you open your mouth, and tell them that you're a comfort women, you will get nothing, just shame. That's how people look at them and how they started mistrusting people because people who have come and promised to help them and made them spend a lot of money gave nothing. They lost respect to them and pointed at them and then they got nothing in the end. Some news report from the early start of AWF told that the victims would get 28.000 dollars, if I remember correctly. That triggered a lot of people to push and look for these women, people who're money-oriented. The victims only wanted their rights, but among them there are people who're just after money.

Q4: How did the victims view Japan in general? Not only the government/military but the country?

A4: I think many of them were able to make a distinction between Good Japanese and bad Japanese. They could have bad temper and can be very violent. But some of them also said that they met a good one during their days as a comfort women. Some of them even said they didn't want to hurt them but they had to do it. But they still look at Japan as the government who is not willing to take responsibility for what they had done in the war, that they had committed a war crime. They don't blame individuals but they blame the state for not acknowledging nor reflecting on their crime. But they could distinguish between individuals and non-individuals.

Q5: Now that the victims are too old and some of them has passed away as well, do you think compensation given to their heir/family will be needed, even if the former comfort women have passed away?

A5: I think that's a very difficult question. There is a discussion about the compensation and what kind of compensation should it be, as well as when do you need to stop giving compensation? This discussion came from Europe, which Dutch (who also colonized Indonesia and gave compensation) took part in. The question is how far do you go to give compensation for the next generation? Because people will keep on claiming money and they might take advantage of that.

Q6: What do you think about the current government of Indonesia? Do you think the current government of Indonesia will reopen this case and give a push to Japan to handle this problem? Do you think it's possible?

A6: I don't think so. There has been no opportunity to do so. I think since Japanese government is very clear of their point of view, especially if you look at how this problem affects the relationship between Japan and Korea, their diplomatic relation and how they're still fighting about the Japanese handles this issue. They had an agreement about it a few years ago, but the agreement became another point of dispute. It's a very complicated thing. This problem determines diplomatic relations with Japan. Because Japan at that point of time started AWF and some of it were pushing it because even if AWF isn't officially from the state, they had to push it because they wanted to help the women. At least in Indonesia, it became a dispute. So many people or the government at least when we see their action, they're still denying, but maybe one or two and think why should we be responsible? They don't wanna acknowledge they committed crime. If you look at this Japanese government, they're not willing to step forward, and Indonesian government doesn't want to either. Especially because Japan is a very important economic partner for them. So, yeah, it's politics.

Q7: But if there's a chance for the Victims and the Japanese side, especially the government to meet, do you think it's possible for the victim to forgive Japan for what they have done to them even after such a long time? Do you think forgiveness is possible by this time?

A7: I don't know. I think some of them might forgive them. But they're still very traumatized about what happened to them. Certainly, for many of them the issue came up at a certain point and then died down again. Because of that, they only got disappointment. Because of that, maybe they want to forget it all. They don't want to open this wound again. They might not want to talk about it anymore. At least some victim has always been outspoken

until the end and asked for Justice from Japan through the Tribunal and even tried to meet the prime minister of Japan, but he didn't even show up. In 2016, I talked to some Japanese volunteers and made a documentary about comfort women. I convinced a few comfort women to be interviewed by the Japanese community because I thought it would give them direct opportunity since it'll be accessed in Japan. But I had to really convince them and didn't want to talk about it at all, they have had enough. There are indeed some people in Japan who want to settle this issue, but it's a minority. In political environment say that it's their history, their nationality, and they decide what is in their history. They don't want to talk about the bad things. The bad things in the history should be gone. Most of the prominent figures of the comfort women is gone.

Q8: So, seeing the situation at the moment, it's most likely not possible for this case to be reopened, right?

A8: No, I don't think so. Even when we had a comfort women exhibition in Indonesia, we had some discussion with some organizations and ministry of the social welfare, they said that they might do something about them, just give us the addresses and then we'll give them something. I said I want them to have a trusted person who can do that and I'm not gonna give them the addresses of the women if nothing comes out of it. In the end, nothing came out of it. If we're starting to talk about compensation and victim of war then we need to look at many more examples, like from Dutch as well as from the Indonesian Government. From what I see there's no sincere effort for what happened in 1965.

The governments are not interested. They may feel sorry, but they don't care about it and care more about things that have bigger impact. It's really a political issue, from what I see at least. It's not about humanity, not making a clear policy and how treat victims of war crimes, victim of conflict. There has to be a more serious effort.

Political government around the world has signed a petition for this issue for Japan to handle this issue. But even political pressure didn't work either. But at least from I see at least there has been interest from young people on this issue and think that justice needs to be something, and so they will not treat people like this in the future. By being interested, hopefully they learn a lesson from it so it won't happen again. It should help the victim—no, maybe the children of the victims that what happened to their mothers/grandmothers is not something to be shameful about. It's something to be angry about, upset. But they have to be recognized, they're very strong women. At least their own community should accept them. In that sense, in Indonesian history, they should give them a place in Indonesian, national history to talk about this.

Q9: After hearing what you said, most likely it's impossible for me to get in contact with the former comfort women? Even just the family or the relatives?

A9: No, because very often the relatives are not directly involved. They cannot tell much or they also feel traumatized as well. I spoke to some people who became pregnant from Japanese and their children are half-Japanese and they had a difficulty to be accepted by people around them as well as their family. The mothers had to build up a new life, they're not accepted by the family members, they had a difficult life. Some of them might talk to somebody and then they stopped. Like, they talked to me, they told the story, but after that, they stopped. They are really old and fragile and don't always remember things, for the ones I know. Their family members don't want them to talk about it anymore. So, I think you'll have to do with secondary materials.

3. Wawancara dengan Kementerian Sosial

Identitas Informan

Nama : Andi Hanindito, dibantu oleh Syarief
 Jabatan : Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
 Institusi : Kementerian Sosial Republik Indonesia
 Nomor / Email : andi.hanindito@kemensos.go.id

- a. Apakah Kementerian Sosial memiliki data mengenai jumlah mantan *Jugun-ianfu* keseluruhan di Indonesia? Berapa jumlah *Jugun-ianfu* yang terdata masih hidup pada saat AWF didirikan dan berapa jumlah yang telah wafat?

Saya Andi Hanindito, Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial. Saya hingga saat ini dengan jadwal yang begitu mendadak, tidak tahu persis jumlah yang terkait dengan *Jugun-ianfu* dan AWF, karena kasus ini sudah cukup lama, maka saya harus mencari dulu, apakah datanya ada di kementerian sosial atau di kementerian lain.

- b. Pada waktu AWF didirikan, pihak Kementerian Sosial Indonesia, tepatnya Ibu Inten Soeweno menolak untuk memberikan kompensasi individual bagi para mantan *Jugun-ianfu*. Alasan apa yang mendasari penolakan tersebut? Apakah ada hubungannya dengan kondisi para mantan *Jugun-ianfu* saat itu?

Saya ulangi, yang kedua, terkait dengan *Jugun-ianfu* dan AWF, sampai sekarang, saya tidak memiliki pengetahuan atau interpretasi tentang *Jugun-ianfu*. Tapi setahu saya sekilas saja, bahwa *Jugun-ianfu* dengan segala persoalan diselesaikan oleh negara, baik Indonesia dan Jepang, kalau tidak salah diselesaikan secara bersama-sama oleh berbagai kementerian-lembaga, walaupun data ini belum akurat betul. Lalu yang terkait dengan kompensasi tadi, mendirikan panti jompo, saya tidak tahu persis karena sepengetahuan saya, persoalan *Jugun-ianfu* ini sudah diselesaikan oleh berbagai kementerian yang sifatnya kolektif, hanya mungkin kementerian sosial atau dalam hal ini departemen sosial diminta untuk menjadi semacam penerima keputusan dari itu.

- c. Selain menandatangani MoU dengan pihak AWF Jepang, apa saja peranan kemensos dalam penanganan para mantan *Jugun-ianfu* ini, terutama pada masa didirikannya AWF, dari tahun 1997-2007?

Mengenai hal tersebut terdapat lengkap di Laporan penanganan masalah isu wanita penghibur (Eks *Jugun-ianfu*) oleh Pemerintah RI kerjasama dengan Asian Women's Fund (AWF). Pada waktu itu, terdapat perwakilan-perwakilan dari Jepang. Sementara itu panti lansia yang sudah diserahkan berjumlah sekitar 120 unit dan telah ditangani di daerah. Kalau sekarang tinggal 73, dan selebihnya alih-fungsi tergantung dari kebijakan daerah.

- d. Bagaimana dengan penanganan para mantan *Jugun-ianfu* pasca dibubarkannya AWF? Apakah sejak tahun 2007 hingga kini, kemensos masih mengambil peranan dalam penanganan para mantan Jugun-ianfu?
 Karena ini merupakan kasus lama kemudian setahu saya kasusnya sudah ditutup dan tidak tahu orang-orangnya masih ada atau tidak, kebanyakan sudah meninggal. Ketika masih hidup mungkin *Jugun-ianfu* banyak yang tidak ingin diketahui, identitas mereka. Karena apa? Karena malu. Kemudian demi untuk eksistensi kedepan, Jugun-ianfu ini membaur dengan masyarakat lainnya untuk mendapatkan pengakuan yang lebih baik dari pemerintah RI. Ini semua mungkin
- e. Sebelumnya bapak menyebutkan bahwa permasalahan Jugun-ianfu ditangani secara kolektif dari kementerian-kementerian, apakah bapak tahu kementerian apa saja yang waktu itu mengambil peranan?
 Saya tidak tahu persis, tapi ini berada di bawah Koordinasi Menko Kesra, jadi saya tidak tahu persis. Bisa dilihat di laporan
- f. Bagaimana dengan aktor/organisasi non-pemerintah? Apakah terdapat pihak-pihak yang memiliki peranan signifikan dalam penanganan atau pemberian bantuan bagi para mantan Jugun-ianfu setelah tahun 2007, baik dari Jepang maupun Indonesia?
 Bisa dilihat di laporan
- g. Pasca dibubarkannya AWF, meskipun bantuan ekonomi tidak dapat lagi diberikan setelah AWF dibubarkan, apakah mungkin bagi pihak Jepang untuk memberikan bantuan psikologis/kesehatan bagi para mantan Jugun-ianfu yang kebanyakan sudah berusia tua sekarang? Menurut anda, manakah yang lebih penting bagi para mantan Jugun-ianfu yang telah berusia lanjut, kompensasi ekonomi secara individual atau penanganan psikis dan psikologis?
 Saya tidak tahu persis, saya tidak mengalami langsung dan tidak mempelajari secara khusus. Tapi data yang ada ini, apakah kompensasi ekonomi atau kompensasi psikologis, karena terdapat kesulitan melacak dan tidak pernah mendapat informasi apapun agar Jugun-ianfu di-intervensi oleh kami melalui kegiatan yang sifatnya baik teknis maupun non-teknis. Rehat lansia tidak diberikan khusus tugas untuk penanganan *jugun-ianfu*. Tugas kami bersifat universal, yaitu menangani lansia alias mereka yang sudah umur 60 tahun keatas, termasuk *Jugun-ianfu*, akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
- h. Bagaimana dengan keturunan/ahli waris para mantan *Jugun-ianfu*? Apakah ada dari mereka yang menuntut pertanggungjawaban atau kompensasi dari Jepang setelah ibu/nenek mereka meninggal?
 Selama saya menjadi direktur (sejak tahun 2017), tidak pernah ada tuntutan yang mempersoalkan terkait dengan keturunan, selama ini hanya mempersoalkan

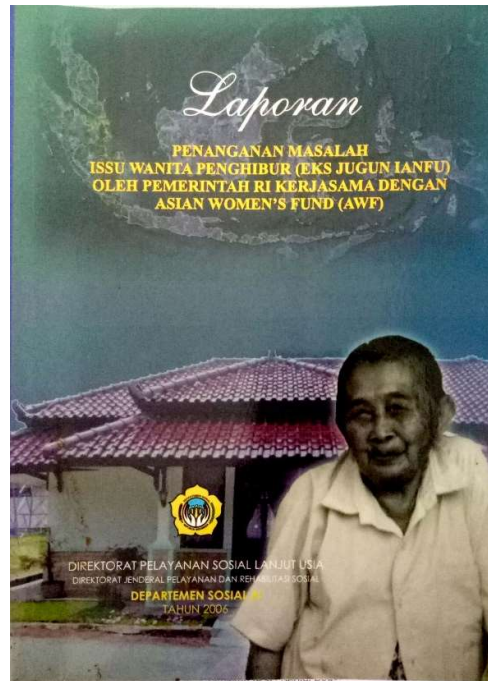
lansianya. Apalagi umumnya, keluarga tidak ingin persoalan ini diangkat ke permukaan karena terkait dengan nama besar keluarga. Terlebih lagi, di zaman otonomi daerah, penanganan panti Lansia ditangani sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada UU no.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Artinya secara mendalam yang terkait dengan Jugun-ianfu dan AWF, kemsos rehat lansia tidak mendalami, karena kebijakan yang terkait dengan penanganan ini tidak ditugaskan secara spesifik kepada kami. Rehat lansia hanya menangani masalah lansia pada umumnya.

Intinya, penanganan lansia tidak lagi membicarakan Jugun-ianfu secara khusus, namun secara universal. Hal ini dilakukan juga karena dikhawatirkan jika isu ini tidak diredam akan muncul pihak-pihak ke-4, atau bahkan ke-5 yang mempergunakan isu ini. Memang mungkin banyak kawan-kawan LSM atau pihak-pihak yang mengatasnamakan keluarga korban, misalnya beberapa tahun lalu terdapat sebuah LSM dari NTT yang menemui kemsos, meminta penanganan, tetapi ketika dicari, lansia yang dimaksud tidak ditemukan.

Pernah juga ada LSM yang menghadap untuk minta agar keluarganya diurus. Namun saya beritahu bahwa di Kemensos sudah tidak ada pembicaraan lagi. Yang ada sekarang adalah intervensi program lansia, dan bukan program bagi Jugun-ianfu secara khusus. Tidak mungkin Jugun-ianfu pada masa kini dan mendatang ditindaklanjuti secara khusus, karena bagi para lansia terlantar, sudah ada panti yang didirikan yang tersebar di daerah-daerah.

LAMPIRAN 4

DOKUMEN PENDUKUNG



Laporan Penanganan 'lanfu' dengan AWF yang diterima langsung dari Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Kementerian Sosial



Wawancara dengan Eka Hindra, penulis buku 'Momoye: Mereka Memanggilku'



Wisma Aster di Panti Sosial Tresna Werdha Pakutandang, Ciparay, Bandung yang mendapatkan biaya renovasi dari AWF pada tahun 2006



Pemutaran Film dokumenter *Shusenjo: The Main Battleground of Comfort Women Issue* di Bioskop CGV Pacific Place Jakarta pada bulan November 2019

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Anniza Kemala, lahir di Jakarta pada 24 November 1993
Anak ke-1 dari pasangan Bapak Bantarto Bandoro dan Ibu Mulyani Ally. Menyelesaikan pendidikan SD Avicenna lulus tahun 2005, SMP Avicenna lulus tahun 2008, SMA *Global Islamic School* lulus tahun 2011, Sarjana (S-1) Hubungan Internasional Universitas Paramadina lulus tahun 2015, dan pada tahun 2018 melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan

Peneliti sebelumnya bekerja sebagai staf di *Consumer Credit Approval Department, Secured Loan Unit* di Kantor Pusat KEB Hana Bank Indonesia. Peneliti juga berpengalaman sebagai *content writer* dan *freelance journalist* di *Ishape* Indonesia, *MicroAd* Indonesia, dan *The Seoul Story* dan pada tahun 2014 hingga 2016.

Karya-karya yang pernah ditulis antara lain: *Cosplay: Dari Hobi hingga Diplomasi* (Juara Pertama Kompetisi Penulisan Kreatif di *Nihon Fest : Road to Gelar Jepang* 2015), *Globalisasi Industri Hiburan Jepang dan Korea: Pengaruh terhadap Perspektif Publik Antar Negara* (Global: Jurnal Politik Internasional Vol 20 No.2), dan *Kim Jong-Un and The Juche Ideology: How Human Needs Affected the Korean Peace Process in 2018* (presentasi dalam diskusi panel di *Varieties of Peace Asia Conference* 2019).